

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK
PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENERIMAAN LAIN YANG
SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA.



PERBEKEL DESA ...
KEPUTUSAN DESA ...
NOMOR .../.../.../ ...

TENTANG

PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT
DESA

PERBEKEL ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Walikota Denpasar Nomor..., Tahun 2021 tentang
Penerimaan Lainnya Yang Sah untuk *Perbekel* dan
Perangkat Desa, Besaran Penerimaan Lainnya yang Sah
untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa ditetapkan dengan
keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Perbekel tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah untuk
Perbekel dan Perangkat Desa, Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611 Tahun 2018);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Penerimaan Lainnya yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Desa ... dengan anggaran sebagai berikut:

<i>Perbekel</i>	: ...
Sekretaris desa	: ...
Perangkat Desa	: ...
Staf Desa	: ...

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Asli Desa dan APB Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal ... 2022
PERBEKEL DESA ...

(NAMA PERBEKEL)

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Walikota Denpasar.
 2. Inspektur Kota Denpasar.
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
 4. Camat ...
 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

B. TAMBAHAN BEBAN PEKERJAAN PEMERINTAH DESA

No	Pelaksanaan Tugas Tambahan	Jumlah Kegiatan/Orang /Dibuat (poin)	Keterangan
1	2	3	4
a	memenuhi target terhadap penggalan potensi desa untuk memenuhi peningkatan PAD	2 (dua) kali	<p>a. Penggalan potensi desa pada kelembagaan, pengelola aset desa, sumber-sumber potensi pendapatan asli desa</p> <p>b. penggalan potensi desa pada kelompok masyarakat pengelola sumber potensi pendapatan asli desa p</p>
b	melaksanakan penggalan peningkatan target potensi untuk perolehan PAD	6 (enam) Kali	Mendata dan menata potensi desa untuk meningkatkan PAD
c	menyelenggarakan musyawarah untuk merencanakan target perolehan PAD	2 (dua) kali -	Menyelenggarakan musyawarah dengan BPD dan Tokoh-Tokoh Masyarakat di dalam upaya peningkatan PAD -
d	pembahasan dan penyepakatan besaran target untuk pencapaian PAD	2 (dua) kali	<p>a. penyampaian target pencapaian pendapatan asli desa</p> <p>b. permintaan keterangan kepada BPD tentang target yang dicapai</p> <p>c. penyampaian rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang pendapatan asli desa</p>
e	melaksanakan penggalan terhadap potensi untuk memenuhi target pencapaian PAD	12 (dua belas) kali	<p>a. melaksanakan rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang Pendapatan Asli Desa</p> <p>b. melaksanakan penjadwalan penggalan PAD</p> <p>c. melaksanakan penggalan potensi aset desa untuk peningkatan PAD</p>

f	evaluasi terhadap pelaksanaan penggalan potensi PAD	4 (empat) kali	a.melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli desa b. membahas usulan perubahan terhadap peraturan dan pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
g	membuat laporan	1 (satu) kali	menyajikan laporan terhadap hasil evaluasi perencanaan pelaksanaan dan terhadap peningkatan pendapatan asli desa

C. FORMAT LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA



PEMERINTAH DESA ...

Alamat ...

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA ... TAHUN ANGGARAN ...

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611 Tahun 2018);

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun ... Nomor ...);

Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Tugas Tambahan

- a. Menggali potensi desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	a. penggalian potensi desa pada kelembagaan, pengelola aset desa, sumber-sumber potensi pendapatan asli desa			a. undangan b. daftar hadir c. notulen/hasil penggalian aspirasi d. foto kegiatan
2.	b. penggalian aspirasi pada kelompok masyarakat pengelola sumber potensi pendapatan asli desa			

Jumlah poin :2 (poin)
dilaksanakan :...(poin)

b.menampung aspirasi peningkatan target potensi untuk perolehan Pendapatan Asli Desa;

No	Nama Warga yang Menyampaikan Aspirasi	Tanggal Penyampaian	Aspirasi yang Disampaikan	Bukti Pendukung
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. ...				a. daftar hadir (dapat berupa buku tamu) b. daftar aspirasi (dapat berupa catatan dalam buku tamu atau bentuk lainnya)

Jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan :...(poin)

c. Menyelenggarakan Musyawarah untuk merencanakan target perolehan Pendapatan Asli Desa;

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	Melaksanakan musyawarah tentang penentuan target pendapatan asli desa setiap 6 bulan sekali			a. undangan b. daftar hadir c. notulen/hasil penggalan aspirasi d.foto kegiatan

d. penyaluran Pembahasan dan penyepakatan target untuk pencapaian Pendapatan Asli Desa;

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	penyampaian aspirasi tentang target pencapaian pendapatan asli desa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan
2.	permintaan keterangan kepada <i>Perbekel</i> tentang target yang telah dicapai			
3	Penyampaian rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang pendapatan asli desa			

Jumlah poin :3 (poin)

dilaksanakan :...(poin)

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penggalan potensi dan potensi Pendapatan Asli Desa;

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1	2	3	4	5
1.	membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang Pendapatan Asli Desa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan
2.	membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang potensi pendapatan asli desa			
3.	membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang penggalan potensi asset desa			

4.	membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang peingkatan Pendapatan Asli Desa			
5.	membahas rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang pemanfaatan tanah Desa			
6.	membahas rancangan Peraturan <i>Perbekel</i> tentang pungutan Desa yang terkait dengan pengelolaan aset desa dan pengelolaan potensi desa			

Jumlah poin :13 (poin)
dilaksanakan :...(poin)

f. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penggalan potensi dan peningkatan Pendapatan Asli Desa;

No	Pelaksanaa Tugas	Tanggal Pelaksan aan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli desa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan
2.	membahas peraturan tentang tata cara pengalian potensi pendapatan asli desa			
3.	membahas usulan perubahan terhadap peraturan dan pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku			

Jumlah poin :7 (poin)
dilaksanakan :...(poin)

g. Membuat laporan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	menyajikan laporan terhadap hasil evaluasi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap peningkatan pendapatan asli desa			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan e. bukti laporan

Jumlah poin :2(poin)
dilaksanakan :...(poin)

B. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa
Perbekel,

*) Catatan:
Laporan disimpan sebagai arsip.

D. RUMUS PENGHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA UNTUK PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

a. Rumus Penghitungan Pencapaian Target Pelaksanaan Tugas Utama

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan (poin)}}{(\text{jumlah dusun} + 16) \text{ poin}} \times 100 \% = \text{pencapaian target.}$$

b. Rumus Penghitungan Persentase Pelaksanaan Tugas Tambahan

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan (poin)}}{42 \text{ poin}} \times 100 \% = \text{nilai persentase.}$$

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA